

**EVALUASI ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

RIQKIANSYAH JERRY

01101003065

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

S
339.207
Riq
e
2014
C1-143053

R:27947/20529

**EVALUASI ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

RIQKIANSYAH JERRY

01101003065

Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**EVALUASI ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Riqkiansyah Jerry
NIM : 01101003065
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

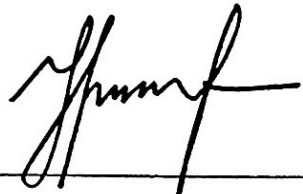
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Ketua :



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA

NIP: 19650816 199512 1 001

Tanggal :

4/5/14

Anggota :



Arista Hakiki, S.E., M.Acc, Ak.

NIP: 19730317 199703 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI ATAS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:


Nama : Riqkiansyah Jerry
NIM : 01101003065
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif pada tanggal 01 Juli 2014
dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

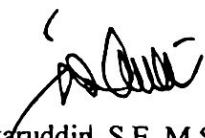
Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 01 Juli 2014


Ketua,


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA
NIP. 19650816 199512 1 001

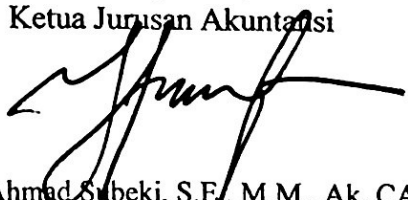
Anggota,


Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak. CA
NIP. 19671210 199402 1 001

Anggota,


Drs. H. Tanzil Djunaidi, Ak. CA, CPA
NIP. 19520706 197802 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. CA
NIP. 19650816 199512 1 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riqkiansyah Jerry
NIM : 01101003065
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
**Evaluasi atas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir pada Dinas
Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.**

Pembimbing :

Ketua : Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
Anggota : Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak.
Tanggal ujian : 1 Juli 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 17 Juli 2014

Pembuat Pernyataan,



Riqkiansyah Jerry
NIM. 01101003065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Belajarliah dari kesalahan di masa lalu, terus berusaha dan mencoba dengan cara yang berbeda dan selalu berharap untuk akhir sebuah kesuksesan di masa depan”

“Success is not a final and Failure is not initial”

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini...

Ayahanda dan Ibundaku

Jerry Nasruddin & Linda Yati

Terima kasih atas segenap ketulusan cinta

& kasih sayangnya selama ini.

Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk Ananda...

Keluarga Besar

Atas naschat, bimbingan, motivasi dan do'a untuk Ananda...

Orang Tersayang, Sahabat dan Teman-teman

Atas semangat dan kesabaran untuk Ananda...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul *Evaluasi atas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang*. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai prosedur penetapan tarif, pengawasan dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir terhadap penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang serta hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sekaligus merangkap sebagai Ketua Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Staf Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, khususnya Kak Adi yang selalu ramah menghadapi Kami.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun pendanaan.
8. Kakak dan adikku, Erriska Famella Jerry S.E dan M. Rafliansyah Jerry, yang selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
9. Pimpinan dan Staf karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, yang selalu memberikan data penelitian sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Pimpinan dan Staf karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang khususnya bagian UPTD Ferparkiran, Kak AK. Julyanzaah dan Kak Adhe yang selalu

ramah dan siap membantu memberikan data penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

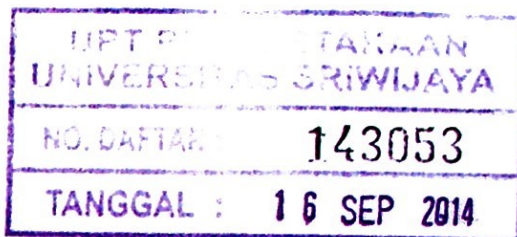
11. Untuk Nyiayu Ajrina Mahiri yang selalu membantu, mendukung dan memotivasi sehingga penulis selalu bersemangat.
12. Sahabatku, M. Agustian Firnando yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
13. Teman-temanku, Zakir, Eva, Wiwin, Alif dan Ririn, selaku menjadi teman terdekat dalam perkuliahan baik senang maupun duka.
14. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu kompak mengejar dosen pembimbing.
15. Teman-temanku sejawat seangkatan 2010 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
16. Teman-temanku Member Sejatiku yang tak disebuti satu persatu.
17. Teman-teman futsalku, Nico, Rahmat, Okki, Tyar, Irfan, Sandri, Etak, dll.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin. Terima kasih.

Inderalaya, 1 Juli 2014

Penulis,

Riqkiansyah Jerry



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	8
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.2. Jenis Penelitian.....	9
1.5.3. Sumber Data Penelitian.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Data.....	10
1.6. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Pengertian Pajak	13

2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.4. Pengelompokan Pajak.....	18
2.1.5. SyaratPemungutanPajak.....	20
2.1.6. Pajak Daerah	21
2.1.6.1. Pengertian Pajak Daerah	21
2.1.6.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	22
2.1.7. Pajak Parkir	23
2.1.7.1. Definisi Pajak Parkir.....	23
2.1.7.2. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir	24
2.1.7.3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir	25
2.1.7.4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	25
2.1.7.5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan	26
2.1.7.6. Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir	27
2.1.7.7. Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir	28
2.2. RetribusiParkir	30
2.3. PenelitianTerdahulu	31

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang	34
3.1.1. Sejarah Singkat	34
3.1.2. Visi dan Misi	35
3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Dishub Kota Palembang	36
3.1.4. Struktur Organisasi Dishub Kota Palembang	37
3.1.5. Susunan Organisasi Dishub Kota Palembang	39
3.1.6. PembagianTugas	41
3.1.7. Keadaan Pegawai	47
3.1.8. Data Penelitian Dispenda Kota Palembang	47
3.2. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang	48

3.2.1	Sejarah Singkat	48
3.2.2	Visi dan Misi.....	49
3.2.3	Tujuan dan Sasaran Dispenda Kota Palembang	50
3.2.4	Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Dispenda Kota Palembang	52
3.2.5	Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang.....	53
3.2.6	Susunan Organisasi Dispenda Kota Palembang	55
3.2.7	Pembagian Tugas	57
3.2.8	Keadaan Pegawai	63
3.2.9	Data Penelitian Dispenda Kota Palembang	63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.	Pengawasan yang Dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dalam Pengelolaan Retribusi Parkir	64
4.2.1.	Pengawasan Langsung.....	65
4.2.2.	Pengawasan Tidak Langsung.....	69
4.2.	Pengawasan yang Dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam Pengelolaan Pajak Parkir.....	71
4.3.	Kendala atau Hambatan Pengelolaan Parkir.....	74
4.3.1.	Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dishub	75
4.3.2.	Kendala atau Hambatan yang Dihadapi Dispenda	77

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi	5
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Palembang Tahun 2008-2012.....	47
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Palembang Tahun 2008-2012.....	63
Tabel 4.1. Jenis Pengawasan Pemungutan Pajak Parkir pada Dispenda	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	38
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	54
Gambar 4.1. Skema Pengawasan Tidak Langsung dalam Pungutan Retribusi Parkir	70

ABSTRAK

Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang

Oleh :

Riqkiansyah Jerry
NIM. 01101003065

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pengawasan dalam pengelolaan pemungutan parkir atas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan retribusi parkir dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terbentuk 2 yaitu pengawasan terhadap wajib pajak parkir dan pengawasan terhadap petugas pemungut parkir. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah yaitu tidak bertemu dengan wajib pajak, wajib pajak menunda pembayaran pajak. Sedangkan hambatan Dinas Perhubungan yaitu pengawasan yang kurang, kemampuan dari pelaksana parkir yang masih butuh pembinaan dan kurangnya fasilitas penunjang parkir.

Untuk meningkatkan pajak dan retribusi parkir, penulis menyarankan agar lebih meningkatkan pembinaan dan diklat untuk pegawai-pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja kerjanya, lebih meningkatkan pengawasan baik itu pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : *Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Penerapan Tarif Parkir, Dinas Perhubungan dan Dispenda Kota Palembang*

ABSTRACT

Evaluation of Admission in Parking Levy Taxon Revenue Office and the Department of Transportation Palembang

By :

Riqkiansyah Jerry
NIM. 01101003065

This study aims to 1) To determine monitoring procedures in the management of the collection of tax revenues and parking over the parking fees at the Revenue Office and the Department of Transportation Palembang, 2) To determine the barriers faced Revenue Office and the Department of Transportation Palembang in improving parking tax revenues and parking fees in the city of Palembang.

The results of this study indicate that in the parking levy supervision performed in 2 forms is direct control and supervision of indirect supervision. While surveillance is conducted at the Regional Revenue Office Palembang 2 is formed oversight of taxpayer oversight of parking and the parking attendant collector. Supervision is done is still not good because there are many fraud committed by the interpreter because of lack of supervision . Barriers faced Revenue Office are not met by the taxpayer , the taxpayer defer payment of tax barriers while the Department of Transportation is less supervision, the ability of the executive parking lot that still needs coaching, supporting facilities and lack of parking .

To increase taxes and parking fees, the authors suggest that further enhance the coaching and training for their personnel so as to improve its performance, better raise the over sight supervision either directly or indirectly.

Keywords: Tax Parking, Parking Levy, Application of parking rates, the Department of Transportation and Revenue Palembang

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riqkiansyah Jerry
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang/02Juni 1992
 4. Agama : Islam
 5. Status : Belum Menikah
 6. Alamat tempat tinggal asal : Jalan Pangeran Ayin Perumahan Bank
 Sumsel Babel Blok C no. 10 Rt. 13
 Lingkungan I Kenten Laut
 7. Alamat email : kian.syah10@yahoo.com
 8. Nomor HP : 089638415658
 9. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan	IPK
1998	-	2004	SD Negeri 2 Kenten	-	SD	8,22
2004	-	2007	SMPN 41 Palembang	-	SMP	8,64
2007	-	2010	SMA 14 Palembang	IPA	SMA	8,50
2010	-	2014	Universitas Sriwijaya Inderalaya	Akuntansi	S1	3,12

10. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2005	Gloria	Bahasa Inggris
2008	Gilland Ganesha	MIPA
2012	Global English Language	Bahasa Inggris
2012	PalComTech	Myob
2013	IAI Wilayah Sumsel	Brevet Pajak A dan B

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Sebuah negara tidak dapat berjalan pemerintahannya jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya (Widodo, Widodo, Puspita, 2010). Mengingat Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor minyak, maka sumber utama penerimaan negara bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Karenanya melalui pajak yang diterima oleh negara pemerintah melakukan pengalokasian dana untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan Negara Indonesia (Sri, Suryo, 2003).

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak. Menurut pasal 23 ayat 2 undang-undang dasar 1945: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Dengan demikian jika ada pungutan dari pihak pemerintah (apalagi pihak swasta) yang dapat dipaksakan yang tidak berdasarkan undang-undang, maka jelas pungutan tersebut per definisi bukanlah pajak (Nurmantu, 2003).

Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya bagi yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajar apabila menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik,

serta adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan pelayanan di daerahnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah diletakkan secara utuh pada Daerah Kabupaten / Kota. Daerah Kabupaten / Kota tersebut dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, maupun Kabupaten/Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak dibedakan dalam dua tingkatan, yaitu pajak untuk propinsi dan pajak untuk kabupaten/kota. Pajak propinsi mencakup empat jenis pajak yang terdiri dari pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak: Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Parkir.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut. Atas dasar hukum tersebut Pemerintah Daerah Kota Palembang mengklaim bahwa terdapat potensi yang sangat besar pada pajak parkir dan retribusi parkir mengingat banyaknya kendaraan yang terdapat di Kota Palembang ini.

Namun pada kenyataannya, parkir yang seharusnya mendapat target besar tetap saja tidak bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal. Bahkan parkir pinggir jalan semakin tumbuh dan semakin kacau. Sepanjang tahun, bisa dipastikan retribusi parkir mengalami kebocoran. Berdasarkan hasil penarikan retribusi parkir di Kota Palembang, jauh lebih buruk dari pengelolaan pajak parkir

di mall. Pengelolaan pajak parkir di mall walau ada kebocoran, namun pengelolaannya masih baik dari pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir
Kota Palembang

2010	Target	Realisasi
Pajak Parkir	2.050.000.000	2.373.884.593
Retribusi Parkir	5.500.000.000	3.590.938.000
2011		
Pajak Parkir	2.748.298.395	3.816.026.337
Retribusi Parkir	5.775.000.000	4.447.905.378
2012		
Pajak Parkir	4.250.000.000	6.566.830.322
Retribusi Parkir	11.550.000.000	5.723.811.192

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pada sektor pajak parkir, realisasi penerimaannya dari tahun ke tahun mencapai target yang telah ditetapkan. Namun lain halnya pada target retribusi parkir di Kota Palembang yang targetnya Rp11 miliar pada tahun 2012, namun yang disetor ke pemkot hanya Rp5 miliar. Ini ada kebocoran sekitar Rp6 miliar.

Parkir di gedung atau parkir progresif, sangat mudah untuk menghitungnya karena keluar masuknya kendaraan mudah dihitung. Sementara parkir di tepi jalan umum, tak jelas penghitungannya. Ini disebabkan, juru parkir di tepi jalan umum, tak jelas dalam memberikan karcis parkir. Kadang, karcis parkir yang hanya itu-itu saja digunakan untuk beberapa kendaraan sehingga yang mendapat keuntungan adalah juru parkir. Retribusi seperti itu yang semakin menguatkan terjadinya kebocoran.

Dari temuan di lapangan, juru parkir beralasan jika pengendara yang parkir diberi karcis atau tidak, itu tetap sama saja karena setoran retribusi parkir yang disetor ke Dinas Perhubungan bukan berdasarkan berapa jumlah karcis parkir yang diberikan ke pengendara, tapi berdasarkan setoran retribusi parkir yang sudah dipatok per hari. Hal inilah memunculkan pertanyaan, apakah petugas dinas yang menarik retribusi per hari itu juga menyetorkannya sesuai yang diterima dari juru parkir?

Pendapatan pajak dan retribusi parkir di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Palembang perlu dievaluasi. Sebab, sejak akhir di 2010 hingga sekarang, kondisinya masih belum baik. Ini mungkin dikarenakan pengawasan dari pengelolaan pemungutan tarif parkir di mall, hotel, ruko dan tempat lainnya belum baik.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Evaluasi atas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dalam pengelolaan pemungutan parkir atas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang?

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan dalam pengelolaan pemungutan parkir atas penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan mengetahui perbandingan atas penerimaan pajak dan retribusi parkir di Kota Palembang.

2. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi peneliti lain.

3. Manfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan untuk layanan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang kepada wajib pajak yang mengenai perbandingan atas penerimaan pajak dan retribusi parkir di Kota Palembang.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengevaluasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.
2. Penelitian diadakan di Dinas Pendapatan Daerah yaitu di Jalan Merdeka No.21 Palembang dan Dinas Perhubungan di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang.
3. Data yang akan diteliti pada periode 3 tahun yaitu 2010 sampai 2012.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang penerimaan pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

1.5.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Sumber data primer (*primary data*)

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Sumber data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun sumber dari internet yang membahas mengenai penerimaan pajak dan retribusi parkir.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi awal tentang permasalahan pada objek.

2. Data sekunder

a. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen, formulir, atau laporan yang terdapat pada objek penelitian sehubungan dengan data yang diperlukan.

b. Studi literatur

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan retribusi parkir pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu :

- Teknik analisa deskriptif kualitatif

Yaitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Pembahasan :

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan mengemukakan dan menguraikan berbagai teori yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan dalam penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, struktur organisasi, visi dan misi, serta data dan fakta. Bab ini juga akan menguraikan sejarah singkat Dinas Perhubungan (Dishub), visi dan misi Dinas Perhubungan serta data dan fakta.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis sesuai dengan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis penelitian serta saran yang diajukan penulis sehubungan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Dinas Pendapatan Daerah. 2013. *Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang*. Diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang [diambil pada 23 Oktober 2013]
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta: Granit
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit : UII PRESS, Jogjakarta
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku I. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan, Marioshot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Pt Raja Grafindo Persada
- Silalahi, Anita. 2013. *Perlunya Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diambil pada 25 Januari 2014 dari <http://anitasilalahi.wordpress.com/2013/04/12.html>
- Sri, Valentina dan Aji Suryo. *Perpajakan Indonesia*. 2003. Yogyakarta: AMP YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Widodo, ATM Widodo, dan Andrea Hendro Puspita. 2010. *Pajak Bumi &
Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media